

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Selatan merupakan kawasan yang penuh dengan konflik baik itu berasal dari dalam negeri maupun antar sesama negara di kawasan. Joseph Leggold melihat kawasan Asia Selatan sebagai kawasan dengan proses regionalisasi yang cenderung lemah serta konfliktual jika dibandingkan dengan kawasan lainnya di Asia.¹ *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) sebagai organisasi intra-kawasan dinilai lambat dalam membangun kerja sama regional dan dalam proses pertumbuhan regionalisme di Asia Selatan.²

India hadir sebagai negara dominan atau *super power* yang memiliki segala macam aspek baik itu dari ekonomi, militer, teknologi, dan sebagainya di kawasan Asia Selatan. India menjalankan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi (PM Modi) pada bulan Mei 2014 melalui partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party. PM Modi dalam pemerintahan luar negerinya terhadap kawasan Asia Selatan menjalankan kebijakan *Neighborhood First Policy* yang didasarkan pada salah satu *point outlook* saat PM Modi melakukan kampanye yaitu

¹ Joseph Leggold, "Regionalism in the Post-Cold War Era: Incentives for Conflict Management," dalam *Regional Conflict Management*, eds. Paul Diehl and Joseph Leggold, Lanham: Rowman & Littlefield, (2003), hal. 15–16.

² C. Raja Mohan, "SAARC: a slow boat to nowhere?". Government of India: Ministry of External Affairs

memprioritaskan pengembangan hubungan kerja sama yang ingin menciptakan Asia Selatan yang damai dan tenteram dengan tetangga-tetangga lainnya di kawasan.

Neighborhood First Policy secara aktif berfokus kepada peningkatan hubungan dengan tetangga terdekat India sebagai landasan awal India untuk membawa pemerintahan India ke kancah internasional sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sesudah Tiongkok.³ Melalui kebijakan ini, India berkeinginan untuk kembali memperkuat kepercayaan investor asing kedalam perekonomian dan kebijakan India. PM Modi dalam acara pelantikannya yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin SAARC kemudian menyatakan komitmen India akan membentuk hubungan erat terhadap negara negara tetangga dan berintegrasi di Asia Selatan melalui kebijakan *Neighborhood First Policy*.⁴

India dalam menerapkan kebijakan *Neighborhood First Policy* menetapkan fokus kebijakannya kepada setiap negara-negara Asia Selatan. Afghanistan merupakan salah satu anggota SAARC yang berbatasan langsung dengan India serta menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam fokus kebijakan *Neighborhood First Policy*. Hal ini dibuktikan dengan besarnya dana yang diberikan untuk memperbaiki perekonomian dan pemerintahan serta banyaknya bantuan kemanusiaan dan infrastruktur berskala besar yang ditujukan kepada Afghanistan serta berbagai kunjungan luar negeri yang dilakukan pemimpin-pemimpin antar kedua negara.

³ Shahrbanou Tadjbakhsh. "South Asia and Afghanistan: The Robust India-Pakistan Rivalry". Oslo: Peace Research Institute Oslo. 2011.p. 33

⁴ Achal Kumar Malhotra.. "India's Foreign Policy: An overview core objectives, fundamental principles and current priorities". Ministry of External Affairs Government of India. 2019. Diakses melalui: <https://www.mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?863>



Gambar 1.1 Peta India-Afghanistan
 Sumber: mapsofindia.com

Gambar 1.1 menunjukkan letak Afghanistan yang merupakan geo-strategis bagi India. Hal membuat India menjadikan Afghanistan sebagai fokus dalam mencapai kepentingan negara dimana Afghanistan menjadi gerbang India dalam mencapai Asia Tengah. India menerapkan berbagai kebijakan dalam mengatur hubungan dengan Afghanistan di bawah kebijakan *Neighborhood First Policy*. Berdasarkan sejarah hubungan India-Afghanistan, India telah menjadi negara pendonor terbesar di kawasan dan Afghanistan merupakan negara penerima donor dari India terbesar kedua. Sejak tahun 2001, India telah mendonorkan bantuan ke Afghanistan lebih dari USD2 miliar.⁵ Bantuan India ke Afghanistan bermacam

⁵ Shantie Mariet D'Souza, "India's Afghanistan Policy: Going beyond the 'goodwill' factor?", Observer Research Foundation and Global Policy Journal, (2016) hal. 38

macam baik berupa infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Bantuan infrastruktur India terhadap Afghanistan seperti bantuan pembangunan kantor parlemen Afghanistan, pembangunan jalan dari Zaranj ke Delaralam. Bantuan pendidikan India untuk Afghanistan berupa bantuan beasiswa dan rekonstruksi bangunan sekolah serta pelatihan administrasi pemerintahan. Bantuan kesehatan India terhadap Afghanistan adalah berupa bantuan rumah sakit serta kesehatan anak.⁶

Pada tahun 2014, ketika Afghanistan sedang mempersiapkan diri untuk tiga transisi politik, keamanan, dan ekonomi secara bersamaan sebagaimana terbentuknya pemerintahan Afghanistan yang baru di bawah pemerintahan Presiden Dr. Ashraf Ghani, India berusaha menghilangkan kekhawatirannya tentang masa depan dengan membuat banyak komitmen jangka panjang untuk keamanan dan pembangunan Afghanistan.⁷ Banyaknya kunjungan serta kerjasama yang tercapai dari kedua negara merupakan bentuk dari kebijakan *Neighborhood First Policy* seperti kunjungan Presiden Dr Asraf Ghani ke India pada bulan April 2015 untuk menemui Presiden India, Shri Pranab Mukherjee dan PM Modi yang membahas kerja sama dan bantuan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, agrikultur, penanganan bencana, sektor sumber daya dan manajemen elektoral.

PM Modi pada tahun 2016 berkeinginan untuk memberikan tambahan bantuan lainnya sebesar USD2 miliar dalam lima tahun ke depan untuk menata

⁶ Ministry of External Affairs Government of India, "India-Afghanistan: A Historic and Time Tested Friendship". Diakses pada tanggal 30 April 2020. diakses melalui: <https://www.mea.gov.in/images/pdf/India-Afghanistan-Map-Book-03012019.pdf>

⁷ Ministry of External Affairs Government of India, "India-Afghanistan Relations 2015". Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020. diakses melalui: https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Afghanistan_2015_07_20.pdf

pemerintahan Afghanistan.⁸ PM Modi juga memulai melakukan kunjungan dengan beberapa delegasi India untuk menghadiri inagurasi bangunan parlemen Afghanistan serta pengumuman beasiswa untuk beberapa universitas dan sekolah di Afghanistan. India juga memberikan empat helikopter tempur Mi 25 kepada angkatan udara Afghanistan.⁹ Pada tanggal 24 Oktober 2017, Presiden Ashraf Ghani melakukan kunjungan ke India untuk menghadiri undangan PM Modi dalam membahas isu terkait perbatasan, terorisme, dan kerja sama yang lebih dengan India. Kunjungan ini memiliki hasil di mana India setuju untuk menambah bantuan terhadap kebutuhan pertahanan dan kekuatan kepolisian. Kerja sama India-Afghanistan pun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.

Namun dibalik tersebut, India dan Afghanistan memiliki sejarah hubungan diplomatik yang cukup rumit. Pada tahun 1996, kelompok ekstrimis Taliban menguasai Afghanistan dengan mengubah nama negaranya menjadi Imrah Islam Afghanistan. Kemunculan kelompok Taliban di Afghanistan berpengaruh kepada hubungan Afghanistan dengan negara tetangga terutama India. Pada rezim ini, Afghanistan memutuskan hubungan diplomatik terhadap India karena Afghanistan yang dikuasai Taliban dibawah naungan negara Pakistan yang notabnya merupakan *counter-hegemon* India.¹⁰ Sesudah runtuhnya rezim Taliban ditangan tentara Amerika Serikat dan sekutu, hubungan diplomatik India-Afghanistan kembali membaik yang

⁸ Afroz Muhammad dan Najish, "Indo-Afghanistan Political Relation Under Modi Government". *Journal of Indian Research*. (2017) hal. 19.

⁹ Ministry of External Affairs Government of India. "India-Afghanistan Relations 2017". diakses pada tanggal 21 Agustus 2020/ diakses melalui:

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/1Afghanistan_October_2017.pdf

¹⁰ D.Sathyanarayanan, (2015):17

ditandai dengan dibuka kembali kantor kedutaan India di Kabul.¹¹ India memberikan peranan aktif dalam rekonstruksi di Afghanistan, meminimalisir pengaruh Pakistan sehingga Afghanistan tidak ikut serta lagi dalam pemberontakan Pakistan di Kashmir.¹²

Pada tahun 2014, Barack Obama memutuskan untuk menarik tentara Amerika Serikat di Afghanistan sehingga membuat keamanan serta pertahanan Afghanistan menjadi rapuh karena kelompok Taliban suatu saat dapat merebut kembali pemerintahan Afghanistan. Adanya alasan lain seperti letak geo-strategis Afghanistan membuat India terus mencoba untuk menanamkan kepentingannya terhadap Afghanistan sehingga membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terhadap apa kepentingan yang ingin dicapai India terhadap Afghanistan melalui kebijakan *Neighborhood First Policy*.

1. 2 Rumusan Masalah

Perdana Menteri India, Narendra Modi memulai pemerintahan luar negeri India dengan mengeluarkan kebijakan *Neighborhood First Policy* yang menekankan kepada hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Selatan. Afghanistan merupakan salah satu negara menjadi salah fokus dalam kebijakan *Neighborhood First Policy* India. Dalam menjalankan kebijakan *Neighborhood First Policy* terhadap Afghanistan, India mencoba menerapkan kebijakannya dengan berbagai hal seperti melalui investasi, perjanjian perdagangan, bantuan kemanusiaan

¹¹ Abdul RoufBhat, et.al, (2018):69

¹² Patryk Kugiel, (2015):352

untuk rumah sakit dan sekolah, infrastruktur hingga bantuan militeristik yang dikeluarkan hingga mencapai USD2 miliar.¹³ Hubungan masa lalu India-Afghanistan yang sempat putus-sambung karena adanya rezim Taliban di Afghanistan serta adanya kebijakan penarikan tentara Amerika Serikat oleh Presiden Barrack Obama pada tahun 2014 dari Afghanistan sehingga membuat Afghanistan menjadi negara yang rapuh dari segi keamanan hingga perekonomian. Banyaknya bantuan ekonomi dan militer serta infrastruktur dari India terhadap Afghanistan membuat penelitian ini menarik untuk melihat apakah kepentingan India terhadap Afghanistan melalui kebijakan *Neighborhood First Policy*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu rumusan masalah, peneliti menarik pertanyaan penelitian: Apa kepentingan nasional yang ingin dicapai India melalui penerapan kebijakan *Neighborhood First Policy* terhadap Afghanistan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Apa kepentingan nasional India terhadap Afghanistan melalui kebijakan luar negeri *Neighborhood First Policy*.

1.5 Manfaat Penelitian

¹³ Vinay Kaura, *Grading India's Neighborhood Diplomacy*, 2018.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

- a) Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan terkait peran negara dalam Ilmu Hubungan Internasional.
- b) Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri India melalui kebijakan *Neighborhood First Policy*.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan serta referensi bagi pemerintah dalam membentuk strategi untuk mencapai kepentingan nasional.

1.6 Studi Pustaka

Bab studi pustaka ini, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan serta perbandingan dengan tulisan ini yang mana secara umum terdiri dari karya ilmiah berbentuk tugas akhir, buku, maupun terbitan jurnal yang membahas permasalahan yang terkait dengan kepentingan India terhadap Afghanistan melalui kebijakan luar negeri *Neighborhood First Policy*.

Studi pustaka pertama merupakan jurnal yang berjudul *Neighbourhood First Policy: Navigating Ties under Modi* yang di edit oleh Aryaman Bhatnagar dan Ritika Passi.¹⁴ Jurnal ini menjelaskan berbagai konten kebijakan Narendra Modi terhadap

¹⁴ Shantie Mariet D'Souza, "India's Afghanistan Policy: Going beyond the 'goodwill' factor?", Observer Research Foundation and Global Policy Journal, (2016) hal. 38

berbagai negara-negara di Asia Selatan seperti awal mula pemerintahan PM Narendra Modi hingga pemilihan opsi kebijakan India atas Pakistan. Afghanistan juga menjadi sub point jurnal yang ditulis oleh Shantie Mariet yang berjudul *India's Afghanistan Policy: Going beyond the goodwill factor?*, menjelaskan poin penting dalam pengambilan kebijakan India terhadap Afghanistan didasarkan dalam keamanan nasional India itu sendiri. Hal ini dapat terlaksanakan jika Afghanistan memiliki pemerintahan yang stabil sehingga dapat meredam konflik Taliban dengan India. Adapun kepentingan lain dalam pengambilan kebijakan India terhadap Afghanistan didasarkan pada konektifitas India terhadap negara-negara lainnya yang berbatasan langsung dengan Afghanistan seperti Iran yang merupakan negara penting penyalur sumber daya energi India sehingga jika Afghanistan mengalami kekacauan akan membuat dampak yang besar untuk India mendapatkan sumber daya energi.

Kesimpulan yang ditarik dari jurnal ini adalah terdapat sebuah perubahan yang besar terhadap pemerintahan India-Afghanistan sebelum dan sesudah rezim Taliban. Keterkaitan Pakistan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kebijakan India atas Afghanistan yang mana juga mengacu kepada keikutsertaan kelompok Taliban di Afghanistan yang akan mengancam keamanan nasional India.

Perbedaan penelitian penulis terhadap jurnal ini adalah dimana jurnal ini hanya mengupas bagaimana keadaan hubungan India dengan Afghanistan dalam pembentukan kebijakan serta tantangan yang akan dihadapi pemerintah India dalam kebijakan tersebut tanpa menggunakan kerangka konseptual dalam menjelaskannya. Sedangkan penelitian ini, penulis akan menjelaskan dimulai dari apa saja kebijakan

yang dibentuk oleh PM Modi dalam kebijakan *Neighborhood First Policy* dan menjelaskannya menggunakan kerangka konseptual Kepentingan Nasional.

Studi pustaka kedua merupakan jurnal yang berjudul *India's Policy toward Afghanistan: Implications to Regional Security Governance* oleh Jin Wang.¹⁵ Jurnal ini membahas tentang kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah India terhadap Afghanistan semenjak runtuhnya rezim Taliban tahun 2001 dimana saat itu India langsung membantu Afghanistan melalui proses pembentukan bangunan negara untuk menstabilkan pemerintahan Afghanistan serta membantu perekonomian dan pembangunan rekonstruksi di Afghanistan.

Poin lain yang coba dijelaskan dalam jurnal ini adalah tantangan kebijakan India terhadap Afghanistan dimana Afghanistan memiliki peluang untuk menjadi negara Islam semenjak mundurnya militer Amerika Serikat dari Afghanistan yang akan berafiliasi dengan negara Islam lainnya yaitu Pakistan dan akan mempengaruhi stabilitas dan keamanan pemerintahan Afghanistan. Poin terakhir merupakan penyesuaian kebijakan India terhadap Afghanistan dimana dalam poin ini menjelaskan berbagai bentuk kebijakan yang diambil pasca rezim Taliban di Afghanistan yang berujung kepada munculnya berbagai perjanjian perjanjian antara kedua negara.

Kesimpulan yang diambil dari jurnal ini adalah Afghanistan perlu untuk meningkatkan keamanan nasionalnya sehingga terhindar dari terbentuknya negara

¹⁵ Jin Wang, *India's Policy toward Afghanistan: Implication to the regional security governance/ Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 11(4) (2017) Hal: 112-120
Dapat diakses melalui: doi:10.1080/25765949.2017.12023321

Islam baru, terpisahnya letak geografis India dan Afghanistan membuat India memerlukan pihak ketiga untuk menyebarkan pengaruhnya di Afghanistan, dan hubungan India-Afghanistan di level internasional sering dipengaruhi oleh faktor Pakistan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jin Wang dengan penelitian ini yaitu terdapat dalam penyajian isi jurnal dimana jurnal ini tidak menggunakan konsep dalam menjelaskan isi konten sedangkan peneliti akan membahas apa saja kebijakan *Neighborhood First Policy* India serta kepentingan nasional apa saja yang ingin India capai terhadap Afghanistan dengan menggunakan kerangka konsep untuk menjelaskannya.

Studi pustaka ketiga merupakan tulisan dari Rajeshwari Krishnamurthy yang berjudul *India-Afghanistan Relations: Innovating Continuity*.¹⁶ Rajeshwary dalam tulisannya mencoba untuk menyimpulkan hubungan serta kebijakan *Neighborhood First Policy* India dibawah PM Modi dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 2014-2017 dimana Rajeshwary memberikan kesimpulan dimana kebijakan ini dapat dilihat dari tiga sektor kunci, yaitu 1) Politik; hubungan politik India-Afghanistan memperlihatkan peningkatan dimana kedua pemimpin sama sama memulai pemerintahan baru pada tahun 2014 dan India terus menekankan kepada bantuan pembangunan kepada Afghanistan sejak dimulainya pemerintahan yang baru, 2) Ekonomi dan Pembangunan; India merupakan negara pendonor terbesar di kawasan

¹⁶ Rajeshwari Krishnamurthy, "India-Afghanistan Relations: Innovating continuity". Institute of Peace and Conflict Studies. (2017). Diakses pada tanggal: 30 April 2020. Dapat diakses melalui: http://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=5340

serta Afghanistan merupakan negara penerima donor terbesar kedua oleh India sebesar USD2 miliar sejak tahun 2001, Modi pun ingin memberikan total bantuan tambahan pada tahun 2016 sebesar USD2 miliar yang akan diestimasikan kedalam bantuan pembangunan. 3) Keamanan, India saat ini masih merasa ragu ragu untuk memberikan bantuan persenjataan untuk Afghanistan, India mengirimkan helikopter pada tahun 2015 guna untuk menjaga keamanan nasional dan kemanan manusia.

Perbedaan tulisan ini terhadap penelitian penulis terdapat kedalam konten yang hanya menjelaskan sektor yang mempengaruhi hubungan antara India dan Afghanistan serta tulisan ini tidak menggunakan kerangka konseptual dalam penjelasannya. Tulisan ini mengambil data selama tiga tahun pemerintahan Modi yaitu pada tahun 2014-2017.

Studi pustaka keempat merupakan jurnal yang ditulis oleh Sumit Gangly yang berjudul *Has Modi truly changed India's Foreign Policy?*¹⁷. Jurnal ini berisi tentang penjelasan tentang arah kebijakan India dibawah pemerintahan Narendra Modi. Jurnal ini mencoba mengupas segala kebijakan luar negeri India terhadap negara-negara tetangga baik itu dari negara-negara tetangga Asia Selatan dan negara lainnya di dunia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Afghanistan sangat memegang peranan penting India untuk mencapai kepentingan nasional terhadap Pakistan. Besarnya hubungan antara India Afghanistan akan mempengaruhi respon Pakistan terhadap India di kawasan.

¹⁷ Ganguly, S, "Has Modi Truly Changed India's Foreign Policy?". *The Washington Quarterly*, 40(2). (2017), hal. 131–143.
Dapat diakses melalui: [doi: 10.1080/0163660x.2017.1328929](https://doi.org/10.1080/0163660x.2017.1328929)

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada isi konten yang membahas banyak negara sedangkan penelitian penulis akan memfokuskan membahas hubungan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai India terhadap Afghanistan, namun jurnal ini menarik untuk melihat arah kebijakan yang diambil PM Narendra Modi dalam menyusun kebijakan luar negerinya.

Studi pustaka kelima merupakan jurnal yang berjudul *India's subregional connectivity initiatives: re imagining the neighborhood*.¹⁸ India Review yang ditulis oleh Harsh V. Pant. Jurnal ini mencoba menjelaskan bagaimana keadaan konektivitas antar negara di kawasan Asia Selatan dimana Afghanistan, Pakistan merupakan tetangga sebelah barat India. Konektivitas sub kawasan sangat mempengaruhi bagaimana keadaan suatu negara tersebut baik dari segi ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Konektivitas antara Afghanistan dan India didasarkan atas keinginan India untuk mencapai negara-negara lain di sub kawasan seperti Iran yang menyalurkan kebutuhan sumber daya energi kepada India. Dalam prakteknya, India setuju untuk membuat jalan dengan Afghanistan untuk menghubungkan India dengan Iran. India juga membentuk perjanjian transportasi bersama Afghanistan dan Iran yang bernama *Chabahar Agreement*. Afghanistan kemudian menjadi kunci India untuk mencapai negara-negara Asia Tengah.

Hal yang membedakan penelitian dengan jurnal ini adalah jurnal ini menyuguhkan penjelasan yang berhubungan terhadap kepentingan India atas

¹⁸ Pant, H. V., & Yhome, K, "India's subregional connectivity initiatives: re-imagining the neighborhood". *India Review*, 19(1), (2020), hal. 33–51.
Dapat diakses melalui: doi:10.1080/14736489.2019.1710082

Afghanistan namun hanya berdasarkan dari segi sub kawasan atau aspek konektivitas saja sedangkan penelitian penulis akan mencoba membahasnya dari berbagai macam aspek lainnya seperti aspek keamanan serta aspek ekonomi.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional merupakan konsep yang paling umum digunakan dalam pembahasan politik luar negeri. Konsep ini dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional. Konsep kepentingan nasional sering diperdebatkan dalam teori Hubungan Internasional kontemporer. Realisme sebagaimana direpresentasikan oleh Morgenthau, melihat kepentingan nasional sebagai kepentingan negara yang dilandaskan oleh kekuasaan. Realisme melihat perilaku negara dalam Hubungan Internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen “kekuatan” yang dimiliki negara tetap dapat terjamin kedaulatannya diantara negara-negara lainnya.¹⁹ Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lainnya.²⁰

Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan konsep kepentingan nasional adalah sebagai tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional

¹⁹ Scott Burchill, “The National Interest in International Relations Theory”. Palgrave Macmillan, (2005), hal. 39

²⁰ Mochtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”. Jakarta: LP3ES, (1990), hal. 163

merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa serta negara. Hal ini mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.²¹

Sedangkan Donald E. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan suatu negara berdaulat untuk berhubungan dengan negara berdaulat lainnya yang didasarkan kepada pertimbangan lingkungan eksternal. Definisi ini memberikan gambaran perbedaan antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal suatu negara dimana lingkungan internal dimaknai sebagai kepentingan umum suatu negara sedangkan lingkungan eksternal merupakan pengaruh dari sistem internasional. Donald E. Nuechterlein juga menjelaskan bahwa kepentingan suatu negara-bangsa berarti kepentingan keseluruhan masyarakat dan bukan hanya kepentingan kelompok dan para elit politik.²²

Menurut Donald E. Nuechterlein, terdapat empat dasar kepentingan nasional yang dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Kepentingan pertahanan; yaitu kepentingan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, wilayah dari ancaman kekerasan fisik yang berasal dari negara lain dan ancaman eksternal terhadap sistem pemerintahan.

Terganggunya aspek ini menyebabkan negara mengambil tindakan serius

²¹ Jack C. Plano, Roy Olton, "The International Dictionary, terj. Wawan Juanda, Third Edition". Clio Press Ltd. England, (1982), hal. 7

²² Donald E Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making", British Journal of International Studies, Vol 2, (1976) hal. 248

terhadap ancaman eksternalnya yang dapat merusak stabilitas dan kedaulatan negara.

- b) Kepentingan ekonomi; yaitu kepentingan negara dalam menjalin hubungan ekonomi yang baik dengan negara lain demi peningkatan kesejahteraan ekonomi. Terganggunya aspek ini mencakup terhadap ancaman kepentingan ekonomi seperti perdagangan, sumber energi, dan berbagai instrumen lain yang berguna untuk menunjang perekonomian negara.
- c) Kepentingan tatanan dunia; yaitu kepentingan mempertahankan kestabilan sistem politik internasional dan sistem ekonomi internasional yang memberikan keuntungan bagi negara dengan upaya pencegahan baik itu dengan jangka pendek maupun jangka panjang.
- d) Kepentingan ideologi; yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi seperangkat nilai-nilai yang dipercayai oleh suatu bangsa dan dipahami sebagai nilai-nilai universal.

Setelah menganalisis kepentingan nasional kemudian peneliti akan menganalisis intensitas kepentingannya. Hal dirasa penting untuk ditentukan karena pemerintah suatu negara mungkin khawatir tentang suatu peristiwa di negara lain. Dengan menganalisis intensitas kepentingan, suatu negara akan mampu merespon isu internasional tersebut dengan sebaik mungkin sehingga tidak merugikan negara.

Terdapat empat indikator yang menentukan intensitas kepentingan tersebut menurut Donald E. Nuechterlein²³:

- a) Isu kelangsungan hidup (*Survival Issues*): memiliki indikator yaitu ancaman bersifat langsung dan nyata dan diperikarakan mampu menghancurkan negara lain. Hal ini berupa serangan militer ke wilayah negara atau terdapat ancaman penyerangan dari musuh baik dari darat, laut, udara. Isu kelangsungan hidup merupakan level indikator tertinggi dimana pada skala ini hanya kepentingan pertahanan saja yang dapat mencapai skala ini berdasarkan definisi yang ada. Ultimatum Hitler pada tahun 1930 dan krisis misil Kuba pada tahun 1962 menjadi salah satu contoh dari *survival issues*. Adapun cara membedakan apakah suatu ancaman merupakan *survival issues* adalah ancaman tersebut merupakan ancaman langsung dan dipercaya dapat memberikan kerusakan fisik terhadap suatu negara berskala besar oleh suatu negara bangsa di negara lain.
- b) Isu vital (*Vital Issues*): memiliki indikator yaitu berupa mengancam politik dan ekonomi suatu negara namun ancaman tersebut masih belum terjadi. Hal ini hampir sama seperti *survival issues* namun *vital issues* suatu negara masih memiliki waktu untuk mencari bantuan kepada negara lain dan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah sehingga bisa saja suatu negara dapat menuntut menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi tindakan asing yang dapat merugikan negara tersebut. Adapun perbedaan dari *vital issues* dengan

²³ Donald E Nuechterlein, hal. 249-250

survival issues adalah dimana *survival issues* hanya melibatkan kepentingan pertahanan sedangkan *vital issues* dapat melibatkan kepentingan ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi. Adapun contoh dari isu ini adalah seperti intervensi Uni Soviet tahun 1968 untuk merubuhkan rezim Dubcek karena kepentingan ideologi dan tatanan dunia telah dipengaruhi sebagai *vital issue* sehingga permasalahan harus diselesaikan dengan cepat.

- c) Isu utama (*Major Issues*): ketika permasalahan ekonomi, politik dan ideologi dipengaruhi secara negatif oleh peristiwa dan tren di lingkungan internasional dan kemudian membutuhkan tindakan yang bersifat mencegah agar tidak menjadi ancaman yang serius. Pada tahap ini, negara mencoba untuk memastikan ancaman yang ada tidak muncul menjadi ancaman yang lebih serius dan dapat mengancam kepentingan dan keamanan negara (isu vital). Kebanyakan kepentingan ekonomi dan ideologi merupakan *major issues* dan bukan *vital issues* namun berbeda dengan kepentingan tatanan dunia karena isu dapat mempengaruhi perasaan suatu negara terhadap keamanannya.
- d) Isu periperal (*Peripheral Issues*): Hal ini diindikasikan ketika kesejahteraan negara tidak dipengaruhi oleh peristiwa atau tren di luar negeri, tetapi kepentingan pribadi warga negara dan perusahaan yang beroperasi terancam. Setiap negara-bangsa menetapkan prioritasnya masing-masing terhadap seberapa besar nilai perusahaan komersial yang beroperasi di luar negeri. Untuk beberapa negara, ini merupakan masalah utama kepentingan nasional, tetapi bagi negara lain itu hanya kepentingan yang bersifat periperal.

Pada penelitian ini konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional India terhadap Afghanistan dalam kebijakan *Neighborhood First Policy* pada tahun 2014-2019 melalui empat kepentingan yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia dan kepentingan ideologi. Peneliti merasa konsep ini layak untuk dipakai karena konsep ini mencakup serta menjelaskan berbagai hal dasar yang menjadi sebuah kepentingan nasional dari suatu negara serta sekaligus dapat melihat kepentingan mana yang memiliki intensitas kecil hingga besar.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan sebuah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Metodologi adalah suatu pendekatan umum yang digunakan untuk mengkaji topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu metode dengan menganalisa data yang kemudian digunakan dalam menyusun pertanyaan penelitian, berdasarkan sebuah studi kasus. Dari kasus tersebutlah peneliti dapat menentukan fokus isu dalam proses pengumpulan data.

Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati²⁴. Creswell melihat pendekatan kualitatif adalah sebagai pendekatan untuk membangun pernyataan

²⁴ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", Bandung: Penerbit: PT Remaja Rosdakarya, (2007)

pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori.²⁵

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif analitik. Menurut Sugiyono, deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.²⁶ Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana bentuk kepentingan India terhadap Afghanistan terhadap kebijakan luar negeri *Neighborhood First Policy* pada masa PM Modi. Disini peneliti akan menganalisa bagaimana kepentingan India terhadap Afghanistan terhadap pengambilan kebijakan luar negeri India.

1.8.2 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada kebijakan luar negeri PM Modi melalui kebijakan *Neighborhood First Policy* pada tahun 2014 hingga tahun 2019 dimana merupakan akhir dari pemerintahan Narendra Modi jabatan periode pertama.

²⁵ John W Creswell, “*Research Design: qualitative, quantitative and method approached*”, Sage Publication: California, (2003)

²⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, AlfaBeta: Bandung, (2009), Hal:29

1.8.3 Unit Eksplanasi, Unit Analisis, Level Analisis

Unit analisis merupakan unit yang akan dideskripsikan perilakunya atau disebut juga sebagai variabel dependen sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi unit analisis atau disebut juga dengan variable independen. Dalam penelitian ini yang akan menjadi unit analisisnya adalah kepentingan nasional India.²⁷ Berdasarkan penelitian ini, yang akan menjadi unit eksplanasinya adalah kebijakan *Neighborhood First Policy* India terhadap Afghanistan. Sedangkan level analisisnya adalah negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan *library research* dalam mengumpulkan data. Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode berbasis dokumen melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai referensi ilmiah yang ada seperti Jurnal, Artikel penelitian, buku, hingga skripsi terdahulu, website mea.gov.in sebagai website pemerintahan luar negeri India, berita dan berbagai publikasi ilmiah lainnya. Terkhusus data data tersebut membahas penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diangkat oleh peneliti. Dari berbagai sumber data tersebut kemudian akan dianalisa untuk dijelaskan lebih rinci oleh peneliti sendiri. dimana data-data tersebut akan dikumpulkan dan dijadikan sebagai sumber acuan dalam melakukan penelitian. Dari sumber-sumber data tersebut kemudian akan dikumpulkan dan dijadikan sebagai

²⁷ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pavehouse, "Level of analysis". Pearson International Edition, International Relation, Eight Edition, (2014) hal.171

sumber acuan dalam melakukan penelitian. Data-data yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan serangkaian jawaban dari permasalahan tersebut.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan beberapa tahapan dalam melakukan teknik analisis data kualitatif melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

Tahap pengelompokan data. Peneliti mengelompokkan data yang sudah dikumpulkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan alur penelitian ini. Awalnya peneliti akan mengelompokkan data-data terkait dinamika hubungan antara India dengan negara-negara lain di kawasan Asia Selatan, kemudian kebijakan *Neighborhood First Policy* dan terakhir kepentingan India terhadap Afghanistan melalui kebijakan *Neighborhood First Policy*.

Tahap reduksi data. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi data-data yang tidak terlalu relevan dengan penelitian yang akan dianalisis agar dapat membantu menjawab permasalahan yang diteliti. Data-data seleksi tersebut kemudian menjadi bahan dasar untuk melakukan analisis penelitian ini. Proses seleksi dilakukan dengan membaca *skimming* setiap bahan yang didapatkan untuk melihat secara garis besar apakah akan membantu menjawab penelitian atau tidak.

Tahap interpretasi. Interpretasi dilakukan sebagai bentuk pemaknaan terhadap setiap bahan yang telah dikumpulkan dan kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi. Pada Bab I, peneliti mengedepankan permasalahan yang menjadi titik tolak pentingnya penelitian ini. Pada Bab II, peneliti mendeskripsikan

hubungan antara India dengan negara-negara lain di kawasan Asia Selatan dengan rujukan bahan-bahan yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Pada Bab III, peneliti menjelaskan kebijakan *Neighborhood First Policy* India terhadap Afghanistan. Selanjutnya pada Bab IV, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan kerangka konseptual kepentingan nasional yang dikategorikan menjadi empat macam kepentingan, yaitu: kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan global, serta ideologi. Setelah menganalisis apa kepentingan India terhadap Afghanistan terhadap kebijakan *Neighborhood First Policy*, penulis kemudian menganalisis intensitas kepentingan tersebut berdasarkan empat macam intensitas, yaitu: isu *survival*, isu *vital*, isu *major*, dan isu *peripheral*.

Terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat apa saja kepentingan yang ingin dicapai India serta intensitas kepentingan tersebut terhadap Afghanistan melalui kebijakan luar negeri *Neighborhood First Policy*.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual.

Bab II. Dinamika Hubungan India-Afghanistan

Bab ini berisi tentang bagaimana hubungan India dengan Afghanistan pada masa sebelum dan sesudah pemerintahan PM Modi.

Bab III. Kebijakan *Neighborhood First Policy* terhadap Afghanistan

Bab ini berisi tentang penjelasan kebijakan *Neighborhood First Policy* India pemerintahan PM Modi terhadap Afghanistan dan negara yang bersangkutan dengan kebijakan *Neighborhood First Policy* India terhadap Afghanistan.

Bab IV. Analisis Kepentingan Nasional India terhadap Afghanistan Melalui Kebijakan *Neighborhood First Policy*

Bab ini berisi tentang analisis kepentingan nasional India yang ingin dicapai melalui kebijakan *Neighborhood First Policy* India terhadap Afghanistan.

Bab V. Kesimpulan

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

